

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara terencana dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, meliputi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan.¹ Permasalahan lingkungan tidak hanya menyangkut aspek ekologi, tetapi juga berkaitan dengan dinamika politik, distribusi kekuasaan, dan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Politik lingkungan mencerminkan bagaimana pemerintah, masyarakat, dan berbagai kelompok sosial berinteraksi dalam menentukan arah pengelolaan dan perlindungan lingkungan, terutama ketika terjadi perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Peran lembaga masyarakat menjadi semakin penting sebagai aktor non-negara yang berkontribusi dalam mendorong kesadaran lingkungan, memobilisasi partisipasi masyarakat, serta mengawal kebijakan pembangunan di segala aspek bidang terkhusus pembangunan desa supaya tetap berorientasi pada keberlanjutan.²

Peran Lembaga masyarakat juga berkaitan erat dengan penguatan tata kelola pembangunan desa. Kelompok masyarakat dapat berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan, menyampaikan aspirasi warga, serta mengawasi pelaksanaan program pembangunan. Melalui pola kemitraan

¹ Siagian, S.P. (2008). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Bumi Aksara. Jakarta hlm.3

² Verdinand Robertua Siahaan, *Politik Lingkungan Indonesia: Teori dan Studi Kasus*, UKI Press, Jakarta, 2020, hlm. 18

tersebut, pembangunan desa dapat dilaksanakan secara lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, keterlibatan kelompok masyarakat mampu menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program pembangunan desa,³ sehingga keberlangsungan program tersebut dapat terjaga dengan lebih baik.

Pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di tingkat nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan kebijakan pembangunan, desa tidak lagi dipandang hanya sebagai sasaran pembangunan, melainkan sebagai pihak yang memiliki potensi, kemampuan, dan kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan. Sehingga, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada seberapa aktif dan teraturnya keterlibatan lembaga formal, lembaga informal, kelompok masyarakat, dan masyarakat desa dalam proses tersebut.

Lembaga masyarakat memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi sarana partisipasi masyarakat yang dibentuk, dikelola, dan dikembangkan oleh

³ Marthen Patiung et al., “Penguatan Lembaga Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri,” *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2025): 30–34, <https://doi.org/10.58290/jupemas.v4i2.430>.

masyarakat untuk memenuhi kepentingan bersama, lembaga tersebut berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah desa.⁴ Melalui lembaga masyarakat, partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat individual, tetapi terkoordinasi dan memiliki arah yang jelas dalam mendukung pembangunan desa. Lembaga masyarakat dapat berupa kelompok pemuda, kelompok peduli lingkungan, kelompok sadar wisata, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya yang bergerak sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa, termasuk dalam pengembangan desa wisata.

Desa wisata dipandang sebagai salah satu pendekatan pembangunan yang mampu menggabungkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan.⁵ Pengembangan desa wisata tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat identitas lokal, serta meningkatkan kapasitas sosial masyarakat. Meskipun demikian, pengembangan desa wisata tidak akan berjalan secara optimal jika hanya mengandalkan peran pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif lembaga masyarakat yang mampu menjadi penggerak, pelaksana, sekaligus penjaga keberlanjutan program desa wisata.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat secara konsisten mendorong desa-desa di Indonesia untuk ikut berkompetisi secara positif melalui berbagai program penilaian dan penghargaan, salah satunya Anugerah Desa Wisata

⁴ Olvit Olniwati Kayupa dkk., “Tantangan Dan Peluang Implementasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa-Desa Di Indonesia,” *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi* 6, no. 1 (2025): 187–99, <https://doi.org/10.35912/simo.v6i1.3483>.

⁵ Herman Hidayat, *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru Dan Reformasi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).hlm.25

Indonesia (ADWI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf atau Baparekraf). Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 adalah ajang penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia untuk mengapresiasi dan mempromosikan desa-desa wisata terbaik di seluruh Indonesia. Program ini menyoroti potensi pariwisata berkelanjutan dan kearifan lokal sebagai motor penggerak ekonomi desa. Program ini tidak hanya sekadar ajang pemberian penghargaan, tetapi dirancang sebagai strategi nasional untuk mengidentifikasi, mengapresiasi, dan mendorong desa-desa wisata yang mampu mengembangkan potensi lokalnya secara inovatif, berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi di tingkat nasional bahkan internasional. ADWI telah berkembang sejak peluncurannya pada tahun 2021, dengan jumlah partisipasi desa wisata yang terus meningkat drastis dari tahun ke tahun menunjukkan antusiasme besar dari berbagai wilayah di Indonesia untuk membangun desa wisata yang unggul.⁶

ADWI juga berperan sebagai wahana pembelajaran dan motivasi bagi desa wisata dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ajang ini mendorong desa-desa wisata untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan dalam pengembangan destinasi mereka, sehingga potensi wisata dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan kelestarian alam dan nilai budaya lokal. Seperti tema ADWI di tahun tertentu, pada tahun 2024

⁶ Sinta Ambarwati "Menparekraf meluncurkan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024," Antara News, March 10, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4003719/menparekraf-meluncurkan-anugerah-desa-wisata-indonesia-2024>.

bahkan diangkat ke arah pariwisata hijau yang mendukung pengembangan destinasi berwawasan lingkungan dan berkelas dunia.

Berikut adalah 50 Desa Wisata Terbaik ADWI 2024 yang diusulkan (50 besar):⁷ Baik, tanpa tabel. Urutannya menjadi seperti ini:

1. Desa Wisata Kampung Rhepang Muaib-Kabupaten Jayapura, Papua
2. Desa Wisata Asei Besar-Kabupaten Jayapura, Papua
3. Desa Wisata Sauwandarek-Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya
4. Desa Wisata Arborek-Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya
5. Desa Wisata Malasigi Village-Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya
6. Desa Wisata Namatota-Kabupaten Kaimana, Papua Barat
7. Desa Wisata Kampung Yoboi-Kabupaten Jayapura, Papua
8. Desa Wisata Letvuan Paradise-Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku
9. Desa Wisata Rutong-Kota Ambon, Maluku
10. Desa Wisata Kampung Saleman-Kabupaten Maluku Tengah, Maluku
11. Desa Wisata Labuan Bajo-Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
12. Desa Wisata Budo-Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara
13. Desa Wisata Rammang-Rammang-Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
14. Desa Wisata Matano-Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
15. Desa Wisata Kadingeh-Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan
16. Desa Wisata Limbong-Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan

⁷ Rizki Hermawan. "Liputan Khusus 50 Desa Wisata Terbaik Indonesia 2024," KOMPAS.com, diakses 11 Agustus 2026, <https://www.kompas.com/>.

17. Desa Wisata Botubarani-Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
18. Desa Wisata Pela-Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
19. Desa Wisata Purun-Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
20. Desa Wisata Tanjung Beringin-Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
21. Desa Wisata Belangian-Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
22. Desa Wisata Kelawi-Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
23. Desa Wisata Munggu-Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan
24. Desa Wisata Sembalun Bumbung-Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
25. Desa Wisata Setiling-Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
26. Desa Wisata Fatumnasi-Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
27. Desa Wisata Tiworiwu-Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur
28. Desa Wisata Penglipuran-Kabupaten Bangli, Bali
29. Desa Wisata Les-Kabupaten Buleleng, Bali
30. Desa Wisata Padarincang Kacida Cibuntu-Kabupaten Serang, Banten
31. Desa Wisata Kampung Batik Kembang Mayang-Kota Tangerang Selatan, Banten
32. Desa Wisata Kampung Gedepangrango-Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
33. Desa Wisata Jatirejo-Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah
34. Desa Wisata Karangrejo-Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

35. Desa Wisata Wanurejo-Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
36. Desa Wisata Kebondalem Kidul-Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
37. Desa Wisata Jatimulyo-Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta
38. Desa Wisata Dewi Anom-Kabupaten Malang, Jawa Timur
39. Desa Wisata Semen-Kabupaten Blitar, Jawa Timur
40. Desa Wisata Banyuanyar-Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
41. Desa Wisata Gunungsari-Kabupaten Madiun, Jawa Timur
42. Desa Wisata Brau-Kota Batu, Jawa Timur
43. Kota Wisata JaboiK-ota Sabang, Aceh
44. Desa Wisata Kawasan Pulo Sibandang-Kabupaten Tapanuli Utara,
Sumatera Utara
45. Desa Wisata Ekowisata Berbasis PRB Nagari Amping Parak-Kabupaten
Pesisir Selatan, Sumatera Barat
46. Desa Wisata Danau Di Ateh-Alahan Panjang-Kabupaten Solok, Sumatera
Barat
47. Desa Wisata Pesona Pagadih-Kabupaten Agam, Sumatera Barat
48. Desa Wisata Tanjung Belit-Kabupaten Kampar, Riau
49. Desa Wisata Keciput-Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung
50. Desa Wisata Kampung Kopi Regis Jaya-Kabupaten Lampung Barat,
Lampung

Dalam pelaksanaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024, desa wisata dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan tingkat

perkembangan dan pengelolaannya, yaitu desa wisata rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Setiap klasifikasi memiliki karakteristik yang berbeda sebagai berikut:

1. **Desa Wisata Rintisan**

Merupakan desa wisata yang berada pada tahap pengembangan. Aktivitas kepariwisataan baru mulai dijalankan dan cakupan pengelolaannya masih terbatas, baik dari segi fasilitas, kelembagaan, maupun jumlah kunjungan wisatawan.

2. **Desa Wisata Berkembang**

Adalah desa wisata yang telah menunjukkan perkembangan yang lebih baik dengan sistem pengelolaan yang relatif stabil. Pada tahap ini, desa wisata umumnya telah memiliki struktur organisasi atau kepengurusan yang tertata dengan jelas untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pariwisata.

3. **Desa Wisata Maju**

Desa wisata pada tahap ini telah memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa maupun kawasan di sekitarnya. Kegiatan pariwisata yang dijalankan mampu menciptakan peluang usaha, lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. **Desa Wisata Mandiri**

Merupakan kategori tertinggi dalam klasifikasi desa wisata, di mana pengelolaan dan kegiatan pariwisata telah terlaksana secara optimal serta berorientasi pada keberlanjutan. Desa wisata dalam kategori ini telah

memiliki daya tarik yang kuat, dikenal secara luas, dan mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai wilayah, baik tingkat regional maupun nasional.

Desa wisata yang terlibat dalam kompetisi ini tidak hanya dinilai dari keindahan alam atau daya tarik wisatanya, tetapi juga dari bagaimana desa tersebut dikelola secara kelembagaan. Keberhasilan sebuah desa dalam memperoleh berbagai penghargaan di bidang pariwisata tidak terlepas dari kontribusi dan keterlibatan aktif lembaga masyarakat yang berperan dalam proses pembangunan. Artinya, yang dinilai bukan hanya objek wisatanya, tetapi juga bagaimana pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan pengelola desa wisata bekerja sama, menyusun aturan, membagi peran, mengelola program, serta menjaga keberlanjutan kegiatan wisata. Tata kelola kelembagaan meliputi kemampuan desa dalam mengelola organisasi masyarakat, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, menerapkan prinsip transparansi, serta membangun kerja sama antar berbagai pihak agar pengembangan desa wisata dapat berjalan secara terarah, profesional, dan berkelanjutan.⁸

Tingkat pendidikan merupakan faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Hal ini sesuai dengan studi yang dilakukan Wiyogo dengan judul *Level Of Education On Community Environ Mental Behavior*

⁸ Hani Siti Hanifah Dkk., "Pengembangan Desa Wisata melalui Strategi Inovasi Produk dan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan BUMDes pada Destinasi Wisata Domba di Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut," *Journal Of Human And Education (JAHE)* 5, No. 2 (2025): 677–86, <https://doi.org/10.31004/Jh.V5i2.2305>.

*In The Katingan River Basin*⁹ yang menyatakan bahwa Pendidikan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sehingga masyarakat lebih mampu memahami dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi. Semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat, maka pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan cenderung lebih rendah.

Namun, kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi di Nagari Amping Parak. Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di Nagari Amping Parak masih tergolong rendah. Jika mengacu pada teori dan study tersebut, kondisi ini seharusnya berpengaruh terhadap rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Masyarakat Nagari Amping Parak justru memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan dengan memperolehnya Nagari Amping Parak sebagai juara 3 ADWI. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi sering dikaitkan dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung mempunyai pemahaman dan kesadaran yang lebih baik terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rendah sering kali lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan keterlibatan dalam

⁹ Wiyogo Wiyogo dkk., "LEVEL OF EDUCATION ON COMMUNITY ENVIRONMENTAL BEHAVIOR IN THE KATINGAN RIVER BASIN," *BALANGA: Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan* 13, no. 1 (2024): 57–64, <https://doi.org/10.37304/balanga.v13i1.18779>.

upaya pelestarian lingkungan. Namun, kondisi tersebut tidak selalu terjadi pada setiap masyarakat. Di Nagari Amping Parak, sebagian masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah dan bekerja sebagai nelayan, petani, serta pelaku usaha kecil. Meskipun demikian, masyarakat tetap menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian mangrove dan penyu yang menjadi bagian penting dari kawasan wisata dan lingkungan pesisir.

Penelitian terkait pengelolaan desa wisata Amping Parak telah banyak dilakukan, seperti studi Wahyuni Maharani, Sri Rahmadani(2025)¹⁰ meneliti partisipasi masyarakat dalam konservasi penyu di Amping Parak, yang menemukan perpindahan perilaku masyarakat dari pengambil telur menjadi pelindung aktif dan keterlibatan warga dalam kegiatan edukasi, patroli pantai, dan perawatan penyu. Kemudian Sirajul Fuad Zis dkk (2025)¹¹ Lebih luas lagi, yakni pengembangan wilayah desa wisata bahari berbasis masyarakat yang menekankan kondisi sumber daya, kepemimpinan terbuka, dan dukungan pemangku kepentingan sebagai faktor kunci pengelolaan potensi wisata bahari di tiga lokasi termasuk Amping Parak.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini secara khusus memfokuskan pada peran strategis Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam pemberdayaan dan pengelolaan wisata berbasis lingkungan di Amping Parak, serta bagaimana peran kelembagaan ini mendorong peningkatan partisipasi masyarakat yang secara nyata berkontribusi terhadap

¹⁰ Wahyuni Maharani, Sri Rahmadani, "Partisipasi Masyarakat Nagari Amping Parak Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan Pada Konservasi Penyu Amping Parak | Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar," Di Akses Pada Februari 24, 2026, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/Pendas/article/view/33327>.

¹¹ Sirajul Fuad Zis Dkk., *Pengembangan Wilayah Desa Wisata Bahari Berbasis Masyarakat, El-Jugrafiyah*, 5(1), 145-157.

keberhasilan Nagari Amping Parak meraih Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024, sehingga penelitian ini tidak hanya melihat proses partisipasi dan kolaborasi secara umum, tetapi juga menilai secara empiris dampak peran LPPL terhadap prestasi tingkat nasional dalam konteks pariwisata desa.

Untuk itu penelitian ini berfokus pada fenomena prestasi yang diraih nagari amping parak yang berhasil meraih tingkat nasional melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia. Pencapaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) amping parak sebagai lembaga masyarakat yang mampu menggerakkan partisipasi warga, membangun hubungan sosial yang harmonis, serta menjalin kolaborasi dengan pemerintah desa. Melalui peran tersebut, masyarakat turut terlibat secara aktif dalam berbagai proses pembangunan desa wisata berbasis lingkungan, sehingga desa memperoleh pengakuan dan penghargaan di tingkat nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Wilayah pesisir Nagari Amping Parak memiliki kawasan hutan mangrove yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir. Keberadaan akar mangrove yang kuat mampu menahan pergerakan gelombang laut, mengurangi dampak abrasi, serta menjaga keseimbangan lingkungan pantai. Keberadaan mangrove bukan hanya sekadar vegetasi pesisir, melainkan sistem perlindungan alami yang menopang keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

Namun demikian, kondisi mangrove di Sumatera Barat menunjukkan situasi yang memprihatinkan. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Sumatera Barat, luas hutan mangrove di wilayah tersebut mencapai 43.186,71 hektar, dengan sekitar 22,67 persen di antaranya mengalami kerusakan. Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk kawasan Amping Parak, di mana tingkat kerusakan mangrove mencapai sekitar 70 persen.¹² Kerusakan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan fungsi kawasan, aktivitas penebangan ilegal, serta pembangunan yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Perubahan fungsi kawasan yang semula dipenuhi rimbunnya bakau menjadi permukiman, tambak, hingga kawasan industri telah menggerus daya dukung lingkungan pesisir. Kerusakan atau hilangnya ekosistem hutan mangrove dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, tidak hanya berupa peningkatan risiko abrasi di wilayah pesisir, tetapi juga memperbesar ancaman bencana bagi masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut. Selain berfungsi sebagai pelindung alami wilayah daratan dari gangguan pesisir, mangrove juga berperan dalam menjaga keseimbangan kualitas udara. Melalui proses fotosintesis, vegetasi mangrove mampu menyerap karbon dioksida (CO₂) dan menghasilkan oksigen (O₂), sehingga turut berkontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim.¹³ Oleh karena itu, kerusakan mangrove tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga berimplikasi terhadap keseimbangan ekosistem secara lebih luas. Menurunnya

¹² Anggia Madni, mediaindonesia.com developer, “Mangrove di Amping Parak, Benteng Hijau Alami dari Abrasi,” diakses 27 Februari 2026, <https://mediaindonesia.com/nusantara/754756/mangrove-di-amping-parak-benteng-hijau-alami-dari-abrasi>.

¹³ Ariya Andika Putra dkk., “Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove: Panduan Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan,” *Journal of Marine and Estuarine Science* 1, no. 1 (2025): 7–13.

tutupan mangrove berarti berkurangnya kapasitas alam dalam menyerap karbon, yang pada akhirnya memperparah pencemaran udara dan krisis iklim.

Dampak ekologis tersebut turut dirasakan secara langsung oleh masyarakat pesisir Amping Parak. Masyarakat setempat mengalami penurunan hasil tangkapan ikan yang sebelumnya banyak ditemukan di kawasan sekitar akar mangrove. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ekosistem mangrove memiliki fungsi penting sebagai habitat dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut yang mendukung kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) Amping Parak berperan sebagai salah satu penggerak dalam upaya pelestarian lingkungan. Kegiatan kepedulian terhadap lingkungan telah dilakukan LPPL sejak tahun 2013. LPPL Nagari Amping Parak merupakan lembaga masyarakat yang secara resmi dibentuk melalui Keputusan Wali Nagari Amping Parak Nomor 225/01/KPTS-WN/AP/I-2013. Kelembagaan tersebut kemudian diperkuat melalui Akta Notaris Lembaga Kelompok Konservasi LPPL Amping Parak Nomor 22 tanggal 1 Maret 2016. Dengan dasar tersebut, LPPL memiliki kedudukan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan konservasi pesisir dan pengelolaan lingkungan di Nagari Amping Parak.¹⁴

Sejak tahun 2018 hingga 2025, LPPL telah memproduksi lebih dari 500 ribu bibit mangrove sebagai bagian dari upaya rehabilitasi kawasan pesisir.¹⁵ Program pembibitan ini telah berjalan secara konsisten selama tujuh tahun terakhir.

¹⁴ Sirajul Fuad Zis, Yonariz, and Hery Bachrizal Tanjung “Komunikasi Kelompok Sadar Pariwisata dalam Pembangunan Berkelanjutan” *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* Vol. 4, No. 1, Edisi Januari-Juni 2024, pp.98-110. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm>

¹⁵ Zulfikar, “Kembangkan Zona Edukasi Mangrove, LPPL Ampiang Parak Dapat Kalpataru dari Kementerian LHK,” diakses 2 Maret 2026, <https://padangkita.com/kembangkan-zona-edukasi-mangrove-lppl-ampiang-parak-dapat-kalpataru-dari-kementerian-lhk/>.

Dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 saja, LPPL berhasil menyemai sekitar 250.000 propagul¹⁶ dengan tingkat keberhasilan hidup mencapai 99 persen. Bibit-bibit tersebut tidak hanya ditanam di Amping Parak, tetapi juga didistribusikan ke berbagai daerah seperti Kota Padang, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Lengayang, dan sejumlah kecamatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan pelestarian yang dilakukan LPPL telah memberi dampak yang lebih luas di tingkat regional.¹⁷

Lebih dari sekadar pembibitan, LPPL juga menekankan aspek pemberdayaan masyarakat. Warga setempat dilibatkan sebagai petani mangrove yang mendapatkan pembinaan langsung dari lembaga tersebut. Pendekatan tersebut tidak hanya mendukung keberlanjutan pelaksanaan program rehabilitasi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Sebagai langkah lanjutan dalam menjaga kawasan konservasi mangrove dan penyu, LPPL juga membangun Markas Pengawas di Nagari Amping Parak. Pembangunan markas yang didukung oleh PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Provinsi Sumatera Barat ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat fungsi pengawasan. Ketua LPPL Amping Parak, Haridman, menyebutkan bahwa markas tersebut memiliki makna strategis karena tidak mudah mendirikan organisasi pengawas atau

¹⁶ Propagul merupakan calon tanaman mangrove yang telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan sejak masih melekat pada induknya. Pada beberapa jenis mangrove, propagul dapat terlepas dari induknya dalam kondisi sudah memiliki bakal akar dan embrio yang siap berkembang ketika jatuh dan menempel pada substrat.

¹⁷ Hairudin Sikumbang "LPPL Amping Parak Produksi 500 Ribu Bibit Mangrove," diakses 2 Maret 2026, <https://www.urangminang.id/lppl-amping-parak-produksi-500-ribu-bibit-mangrove-pionir-pelestarian-pantai-pesisir-selatan/>.

lembaga masyarakat harus memiliki kompetensi khusus, yang telah dimiliki oleh LPPL Laskar Pemuda Peduli Lingkungan juga mengembangkan berbagai program wisata berbasis mangrove yang terintegrasi dengan upaya pemberdayaan masyarakat lokal.

Dalam upaya menjaga dan melindungi kawasan konservasi, LPPL melakukan kegiatan patroli secara rutin dengan menggunakan kapal yang menggunakan energi listrik. Penggunaan kapal listrik ini dinilai lebih efisien karena mampu menghemat hingga sekitar 77 persen biaya operasional dalam kegiatan pengawasan kawasan konservasi laut. Patroli tersebut dilakukan baik pada siang maupun malam hari untuk memastikan kondisi kawasan tetap terjaga. Melalui kegiatan ini, LPPL dapat memantau serta melindungi berbagai habitat penting di wilayah pesisir, seperti ekosistem mangrove dan kawasan peneluran penyu, sehingga keberlangsungan ekosistem laut di Nagari Amping Parak dapat tetap terjaga. Lppl juga mengembangkan konsep wisata edukasi PRB (Pengurangan Risiko Bencana) program ini menjadi salah satu daya tarik kepariwisataan yang menggabungkan konservasi, edukasi, dan kesiapsiagaan bencana, menjadikannya jauh lebih dari sekadar destinasi wisata biasa.¹⁸

Lembaga ini secara berkala menyelenggarakan pelatihan konservasi berbasis masyarakat, seperti pelatihan pengelolaan konservasi penyu, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, akademisi, dan instansi pemerintah, untuk memperkuat pemahaman, keterampilan, dan partisipasi warga dalam konservasi. Keberadaan

¹⁸ Rls-Nancy,Antara News Agency, “Kapal Laskar Pemuda Amping Parak pakai energi listrik bisa hemat sampai 77 persen,” Antara News Sumbar, 7 Maret 2023, <https://sumbar.antaranews.com/berita/557616/kapal-laskar-pemuda-amping-parak-pakai-energi-listrik-bisa-hemat-sampai-77-persen>.

program ini memperluas fungsi kawasan mangrove, yang tidak hanya berperan sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai sarana pendidikan lingkungan dalam meningkatkan kesadaran terhadap konservasi ekosistem pesisir.¹⁹

Sebagai salah satu unsur yang memperkuat daya tarik wisata kawasan pesisir. LPPL turut mengembangkan wisata konservasi penyu yang terintegrasi dengan kawasan mangrove. Kegiatan konservasi penyu memberikan peluang bagi wisatawan untuk memahami secara langsung proses reproduksi penyu, mulai dari penetasan hingga pelepasan tukik ke laut. Selain berfungsi sebagai sarana edukasi lingkungan, program ini juga memperkuat posisi Amping Parak sebagai kawasan wisata yang berorientasi pada pelestarian alam. Secara keseluruhan, berbagai program wisata mangrove dan penyu yang dijalankan LPPL menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan aktivitas wisata, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

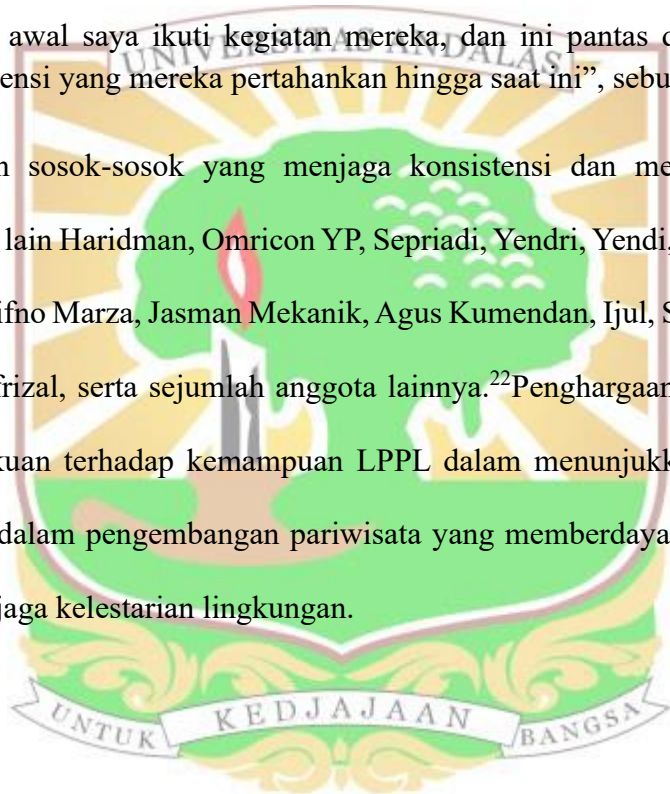
Perjalanan panjang yang ditempuh LPPL Amping Parak dalam mengubah lingkungan menjadi lebih bernilai dan bermanfaat tentu tidak berlangsung tanpa tantangan. Berbagai hambatan pernah mereka hadapi, namun setiap rintangan tersebut mampu dilalui berkat ketekunan dan komitmen yang mereka jaga. Setelah melalui proses panjang dan penuh tantangan Nagari Amping Parak akhirnya mencatat prestasi nasional dengan meraih Juara III Anugerah Desa Wisata

¹⁹Yoni Syafrizal "Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan," diakses 5 Maret 2026, <https://www.pessel.pesisirselatankab.go.id/berita/pelatihan-konservasi-penyu-yang-digelar-pokwasmas-lppl-libatkan-masyarakat-amping-parak>

Indonesia (ADWI) tahun 2024 kategori resiliensi,²⁰ sebuah capaian yang membanggakan bagi masyarakat setempat maupun Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan berita yang di liput oleh Antara News Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Mawardi Roska, pada Senin (27/5) menyampaikan bahwa:²¹

“Sejak awal saya ikuti kegiatan mereka, dan ini pantas dihargai, karena konsistensi yang mereka pertahankan hingga saat ini”, sebutnya.

Adapun sosok-sosok yang menjaga konsistensi dan merawat kawasan tersebut antara lain Haridman, Omricon YP, Sepriadi, Yendri, Yendi, Jamaludin, Sri, Rino Fiki, Harifno Marza, Jasman Mekanik, Agus Kumendan, Ijul, Soron, Nofendra Harianto, Syafrizal, serta sejumlah anggota lainnya.²² Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kemampuan LPPL dalam menunjukkan inovasi dan keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata yang memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.



²⁰ Resiliensi adalah kemampuan individu, kelompok, masyarakat, atau suatu wilayah untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit kembali dari berbagai ancaman, gangguan, bencana, maupun perubahan yang terjadi, tanpa kehilangan fungsi utama yang dimilikinya.

²¹ Siri Antoni, “*Sekda Mawardi Roska : Konsistensi LPPL Amping Parak peduli lingkungan patut dihargai,*” Antara News Sumbar, 28 Mei 2024, <https://sumbar.antaranews.com/berita/613236/sekda-mawardi-roska--konsistensi-lppl-amping-parak-peduli-lingkungan-patut-dihargai>.

²² Lucky Zamzami dkk., *Studi Pengelolaan Ekowisata Berbasis Komunitas Lokal Nelayan dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah di Sumatera Barat* (Padang: FISIP Universitas Andalas, 2020), hlm. 27.



Gambar 1. 1 Amping Parak Juara 3 Resiliensi Anugrah Desa Wisata Indonesia 2024

Peran Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) sebagai lembaga masyarakat memiliki posisi yang penting dalam pencapaian penghargaan tersebut. Sejak awal pembentukannya, LPPL menjadi aktor utama yang secara konsisten berkontribusi dalam upaya konservasi lingkungan serta pengembangan ekowisata di Nagari Amping Parak. Berdasarkan berbagai temuan dan pernyataan yang diperoleh peneliti di atas, dapat diasumsikan bahwa keberhasilan Nagari Amping Parak meraih Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2024 tidak hanya dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga oleh peran Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) sebagai aktor lokal dalam menggerakkan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. LPPL diduga mampu membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan, khususnya konservasi mangrove dan penyu. Dalam perspektif politik lingkungan, peran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan

pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan aktor lokal dalam memengaruhi cara pandang, perilaku, dan tindakan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. sehingga mampu meraih penghargaan bergengsi yaitu Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Dengan demikian, fokus penelitian ini diarahkan pada rumusan masalah yaitu: Bagaimana Peran Laskar Pemuda Peduli Lingkungan dalam Meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia di Nagari Amping Parak 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam mendukung keberhasilan Nagari Amping Parak meraih Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu:

1. **Secara akademis**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait peran LPPL dalam meraih ADWI di Nagari Amping Parak, Pesisir Selatan.
2. **Secara praktis**, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana bentuk terkait peran LPPL dalam meraih ADWI di Nagari Amping Parak, Pesisir Selatan